



Penelitian



ANALISIS KENDALA PEMENUHAN CAKUPAN VAKSINASI COVID-19

Gusrinety¹, Zulkarnain², Rizma Adlia Syakurah³

^{1,2,3}Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: Oktober 03, 2022
 Revised: Oktober 10, 2022
 Accepted: November 03, 2022
 Available online: November 28, 2022

KEYWORDS

Cakupan; Covid 19; Vaksinasi.

CORRESPONDING AUTHOR

Zulkarnain

E-mail: septi_2003@yahoo.com

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia melakukan vaksinasi bagi seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari melalui aplikasi KPC PEN per tanggal bulan November 2021 capaian vaksinasi COVID-19 sebesar 43,57% dan per tanggal 17 Januari 2022, total capaian vaksinasi COVID-19 mengalami peningkatan menjadi 70% dari target Provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala pemenuhan cakupan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Batang Hari Tahun 2022. Penelitian ini merupakan studi deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah sumberdaya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan program vaksinasi COVID-19 di 3 Kecamatan yang berjumlah 36 orang. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi dan Focus Group discussion (FGD). Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pelaksanaan vaksinasi di 3 Kecamatan Kabupaten Batang Hari, walaupun terdapat beberapa kendala, pelaksanaannya telah sesuai dengan kebijakan pemerintah. SDM tercukupi, dana pelaksanaan vaksinasi berasal dari APBD dan diatur langsung oleh pemerintah daerah, sarana dan prasarana juga tercukupi. Ada tambahan dana yang berasal dari dana BLUD Puskesmas untuk pemenuhan kebutuhan makan minum dan pembelian laptop, kertas dan sebagainya. Penjadwalan kegiatan vaksinasi ditentukan langsung dari masing-masing Puskesmas dan hasil capaian vaksinasi dari 3 Kecamatan yang diteliti telah mencapai target 70% untuk vaksindosis 1, sedangkan dosis 2 dan dosis 3 belum mencapai target provinsi. Beberapa kendala yang terjadi adalah seperti dana insentif insentif tenaga kesehatan, tidak semua SDM terlibat pelatihan pelaksanaan COVID-19, perlunya tambahan SDM untuk pelaksanaan vaksinasi di wilayah-wilayah terpencil, sosialisasi vaksinasi kepada masyarakat belum secara optimal, pemanfaatan media sosialisasi yang kurang seperti spanduk dan radio, sarana dan prasarana transportasi yang rusak seperti kendaraan operasional puskesmas, stok vaksinasi tidakmencukupi, genset serta perencanaan pelaksanaan yang kurang komunikasi.

The Indonesian government has vaccinated all elements of society to prevent the spread of the COVID-19 virus. Data from the Batang Hari District Health Office through the KPC PEN application as of November 2021 the achievement of COVID-19 vaccination was 43.57% and as of January 17, 2022, the total achievement of COVID-19 vaccination had increased to 70% of the provincial target. This study aims to analyze the obstacles to fulfilling the COVID-19 vaccination coverage in Batang Hari Regency in 2022. This study is a descriptive study through a qualitative approach. The informants in this study were human resources involved in the implementation of the COVID-19 vaccination program activities in 3 Districts, totaling 36 people. Collecting data using interviews, observation, documentation, and Focus Group Discussion (FGD). Based on the results of interviews, it is known that the implementation of vaccination in 3 Sub-districts of Batang Hari Regency, although there are several obstacles, its implementation is in accordance with government policy. Sufficient human resources, funding for vaccination implementation comes from the APBD and is regulated directly by the local government, facilities and infrastructure are also sufficient. There are additional funds from the Puskesmas BLUD funds to meet the needs of eating and drinking and purchasing laptops, paper and so on. The schedule of vaccination activities is determined directly from each health center and the results of vaccination achievements from the 3 sub-districts studied have reached the target of 70% for dose 1 vaccine, while dose 2 and dose 3 have not reached the provincial target. Some of the obstacles that occur are such as insufficient incentive funds, human resources who do not attend training, shortage of human resources for remote areas, community outreach and inadequate use of media, damaged facilities and infrastructure, vaccination stock and poor communication planning for implementation. The results show that the implementation of vaccination has been going well, but there are several obstacles such as insufficient funds, especially incentives for health workers, not all human resources are involved in training on the implementation of COVID-19, the need for additional human resources for the implementation of vaccinations in remote areas, socialization of vaccinations to the public, not optimally, the use of socialization media is not enough such as banners and radios, damaged transportation facilities and infrastructure such as operational vehicles for health centers, insufficient vaccination stock, generators, and poor communication planning implementation.

PENDAHULUAN

Corona virus disease 2019 atau COVID-19 merupakan kejadian pandemi dimana penyebarannya berjalan dengan begitu cepat. COVID-19 awalnya diketahui pada penghujung Desember 2019 yang bermula terjadi di Wuhan, Cina, dimana kasus ini

muncul ditandai dengan adanya pasien yang memiliki gejala pernapasan (respirasi).¹ Penyakit COVID 19 ini adalah penyakit baru yang dapat ditularkan antar manusia. WHO menyatakan bahwa COVID-19 sebagai pandemi dunia dikarenakan penyebaran dan peningkatan jumlah kasusnya yang pesat.²

Data World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa kasus COVID-19 ini menyebar keseluruh bagian negara Cina dan dalam kurun waktu 1 bulan menyebar ke negara lainnya, termasuk Italia, Amerika Serikat, dan Jerman.³ Kasus COVID-19 telah menyebar lebih dari 223 negara dan teritori. WHO mencatat hingga 15 November 2021, terdapat 260 juta kasus terkonfirmasi dan 5,13 juta kasus kematian di dunia.⁴ Kasus COVID-19 di Indonesia berdasarkan data terbaru pada tanggal 17 Februari 2022, jumlah kasus COVID-19 terkonfirmasi sebanyak 4.266.195 kasus dengan kasus aktif sebanyak 6.108 (0,14%), penderita yang sembuh sebanyak 4.115.958 orang (96,48%) dan meninggal dunia sebanyak 144.129 orang (3,38%).⁵

Data terbaru Pemerintah Provinsi Jambi per tanggal 17 Februari 2022, diketahui jumlah kasus aktif COVID 19 berjumlah 1036 orang (3,34%), yang terkonfirmasi COVID 19 sebanyak 31.030 orang (0,73%), yang dinyatakan sembuh sebanyak 29.205 orang (94,12%) dan meninggal dunia berjumlah 789 orang (2,54 %) dari data nasional. Jumlah kasus positif dikonfirmasi berdasarkan pemeriksaan dengan metode *Polymerase Chain Reaction* (PCR).⁶ Merebaknya virus COVID-19 memberikan dampak terhadap Sebagian besar aktivitas masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan protocol Kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak minimal 1–2 meter menyebabkan meningkatnya tingkat kerentanan masyarakat terinfeksi COVID 19. Diperkirakan 2,5 juta kasus COVID-19, akan memerlukan perawatan di rumah sakit di Indonesia dengan angka kematian yang diperkirakan mencapai 250.000 kematian jika tidak ada intervensi Kesehatan masyarakat yang cepat dan tepat.⁷

Pemerintah Indonesia melakukan vaksinasi bagi seluruh elemen masyarakat. Vaksinasi bertujuan untuk mengurangi penularan/transmisi COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, serta mencapai kekebalan kelompok (*herd Immunity*). Vaksinasi COVID-19 ini dilaksanakan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Pemerintah juga sudah menjamin keamanan vaksin karena sudah melalui uji klinis yang ketat.⁸ Berdasarkan data *Our World in Data* pada bulan Februari 2022, jumlah vaksinasi COVID-19 di seluruh dunia dengan kategori minimal 1 dosis berjumlah 4.898.997.900 orang (62,8%), divaksinasi lengkap berjumlah 4.318.058.319 orang (55,4%) dan vaksin booster berjumlah 1.262.595.581 orang (16,2%). Sedangkan secara nasional, data vaksinasi COVID-19 di Indonesia minimal 1 dosis berjumlah 189.533.698 orang (69,3%), divaksinasi lengkap berjumlah 139.946.128 orang (51,2%) dan vaksin booster berjumlah 8.456.612 orang (3,1%).

Cakupan vaksinasi COVID-19 di Provinsi Jambi per tanggal 19 Februari 2022 untuk dosis 1 berjumlah 2.420.575 orang

(90,11%), dosis 2 berjumlah 1.727.967 orang (64,33%) dan dosis 3 berjumlah 59.868 orang (2,44%). 3 Kabupaten/Kota dengan capaian vaksinasi terendah adalah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun dan Kota Sungai Penuh. Sedangkan Kabupaten Batanghari berada pada capaian vaksinasi terendah urutan ke-5.⁴ Kabupaten Batanghari adalah salah satu Kabupaten/Kota yang menjadi bagian dari Provinsi Jambi. Berdasarkan data rekapitulasi sementara kegiatan vaksinasi COVID-19 Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari melalui aplikasi KPC PEN Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi ketercapaian vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Batang Hari sampai dengan bulan November 2021 adalah sebanyak 200,018 suntikan vaksinasi (43,57%). (KemenKes & KPC PEN, 2021)

Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari melalui aplikasi KPC PEN per bulan November 2021 menyatakan data rekapitulasi sementara kegiatan vaksinasi COVID-19 adalah sebanyak 200,018 suntikan vaksinasi (43,57%), per tanggal 17 Januari 2022, total capaian vaksinasi COVID-19 mengalami peningkatan menjadi 70% dari target Provinsi, artinya terjadi kenaikan yang signifikan dari capaian pada bulan-bulan sebelumnya. Per tanggal 07 Februari 2022, total capaian vaksinasi COVID-19 sebesar 69,40%. Kecamatan dengan capaian vaksinasi tertinggi adalah Kecamatan Maro Sebo Ilir sebesar 64,03%, capaian vaksinasi sedang adalah Kecamatan Muara Bulian sebesar 59,16% dan capaian vaksinasi terendah adalah Kecamatan Bajubang sebesar 50,57%.⁴

Vaksinasi merupakan salah satu upaya Kesehatan masyarakat yang paling efektif dan efisien untuk mencegah beberapa penyakit menular yang berbahaya. Peranan vaksinasi yang tercatat dalam sejarah sangat besar dalam menyelamatkan masyarakat dunia dari kesakitan, kecacatan bahkan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Vaksinasi (PD3I). salah satu penyakit yang memerlukan upaya vaksinasi adalah COVID-19 yang saat ini telah dilakukan oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini dibutuhkan kepastian baik dari aspek efektivitas maupun efisiensi, sehingga dilakukan beberapa upaya mulai dari penelitian dan pengembangan vaksin, penyediaan vaksin, dan pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan ketersediaan vaksin. Dalam penerapan vaksinasi COVID-19, cakupan pelaksanaan merupakan hal penting yang perlu diperhatikan juga, karena konsep kekebalan kelompok (*herd immunity*) dapat terbentuk apabila cakupan Vaksinasi tinggi dan merata didapat di seluruh wilayah, maka secara tidak langsung akan ikut memberikan dampak yang baik yaitu perlindungan bagi Sebagian besar sasaran kelompok usia lainnya seperti lansia, kelompok rentan dan anak-anak.⁹

Pemerintah pusat saling bekerja sama dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta badan

hukum/badan usaha dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini dilakukan melalui dua kegiatan yaitu vaksinasi program atau vaksinasi gotong royong. Dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19, dinas Kesehatan provinsi, dinas Kesehatan kabupaten/kota dan Puskesmas harus melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan setempat, serta berkoordinasi dengan lintas program, dan lintas sector terkait, termasuk beberapa organisasi yaitu organisasi profesi, organisasi masyarakat, organisasi berbasis agama, para petua/ tokoh masyarakat beserta seluruh komponen masyarakat yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan vaksinasi COVID-19. Dalam hal ini, pemerintah menganjurkan agar petugas Kesehatan bisa melakukan upaya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat serta memantau status vaksinasi setiap sasaran yang ada di wilayah kerjanya untuk memastikan setiap sasaran mendapatkan vaksinasi COVID-19 secara lengkap.⁹ Berdasarkan hal-hal yang disebutkan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Kendala Pemenuhan

Cakupan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Batanghari Tahun 2022”.

METODE

Penelitian ini merupakan studi deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di 3 Kecamatan di Kabupaten Batang Hari yaitu, Kecamatan Maro Sebo Ilir mewakili Kecamatan dengan cakupan vaksinasi. Tertinggi (Puskesmas Maro Sebo Ilir), Kecamatan Muara Bulian dengan cakupan vaksinasi sedang (Puskesmas Muara Bulian) serta Kecamatan Bajubang yang mewakili Kecamatan dengan capaian vaksinasi terendah (Puskesmas Penerokan). Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret-April 2022. Informan dalam penelitian ini adalah sumberdaya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan program vaksinasi COVID-19 di 3 Kecamatan yang berjumlah 36 orang. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi dan Focus Group discussion (FGD). Data dianalisis secara reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan

Kasi Survelen dan Imunisasi	Kepala Puskesmas Muara Bulian	Kepala Puskesmas Maro Sebo Ilir	PJ MUTU Puskesmas Penerokan
<p>Pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Batang Hari sudah berjalan dengan sasaran sebanyak 32.267 dan sasaran anak 4.446. Ada beberapa sasaran yaitu tenaga kesehatan, pelayanan publik, lansia, masyarakat, remaja dan anak.</p> <p>Untuk pelaksanaan vaksinasi telah dilakukan oleh semua fasilitas kesehatan yang tersebar di 18 Puskesmas di Wilayah Kerja Kabupaten Batang Hari, 2 Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit pemerintah dan Rumah Sakit Swasta, serta klinik-klinik di Kabupaten Batang Hari.</p>	<p>Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 telah dilaksanakan sesuai kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi pandemik COVID-19. Kebijakan pelaksanaan COVID-19 ini berasal dari pemerintah pusat sendiri melalui Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, SATGAS COVID-19 dan BNPB mulai dari pelaksanaan vaksinasi, penyimpanan, syarat perjalanan dan sebagainya</p> <p>Dalam pelaksanaan kebijakan, terdapat kendala yaitu tidak adanya turunan kebijakan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yang artinya tidak ada penguatan lagi dari pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan pelaksanaan vaksinasi tersebut.</p>	<p>Pelaksanaan vaksinasi untuk Kabupaten Batanghari sudah mengikuti kebijakan pusat contohnya capaian vaksinasi harus 70%, waktunya pelaksanaan vaksinasi anak sekolah dan waktunya vaksinasi booster. Pelaksanaan sudah dilakukan dengan percepatan vaksinasi.</p>	<p>Kebijakan pelaksanaan COVID-19 telah dilaksanakan sesuai Permenkes No.10 tahun 2021 tentang vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19.</p> <p>Kebijakan diturunkan ke pemerintah daerah masing-masing, turunannya sudah sangat optimal untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Batang Hari.</p> <p>Ada beberapa wilayah dalam target vaksinasi Puskesmas penerokan yaitu 7 Desa yang terdiri dari Desa Penerokan, Mekar Jaya, Ladang Keris, Bajubang, Desa Sungkai, Pompa Air dan Desa Bungku. Dari ketujuh desa tersebut, Desa Bungku merupakan desa yang sangat luas.</p>
<p>Kendala: Kebijakan hanya dari Pemerintah pusat, Pemerintah daerah tidak membuat turunan yang artinya tidak ada penguatan lagi dari pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan pelaksanaan vaksinasi tersebut.</p>			

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pelaksanaan vaksinasi COVID-10 sudah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat. Sesuai dengan Permenkes RI Nomor 10 tahun 2021, vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan

kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.¹⁰ Namun, ada kendala dalam kebijakan pelaksanaan vaksinasi yaitu tidak adanya penguatan dari pemerintah daerah

kepada Puskesmas di Wilayah Kerja Kabupaten Batanghari untuk

memperkuat kebijakan pelaksanaan vaksinasi tersebut.

Sumberdaya Manusia

Kasi Survelen dan Imunisasi	Kepala Puskesmas Muara Bulian	Kepala Puskesmas Maro Sebo Ilir	PJ MUTU Puskesmas Penerokan
<ul style="list-style-type: none"> SDM yang tersedia telah tercukupi, dan dari awal sudah ditentukan bahwa tim vaksinasi COVID-19 harus berjumlah 20 orang, sehingga jumlah SDM pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Batanghari secara keseluruhan berjumlah 466 orang SDM yang terlibat telah dilatih dan diberi bimbingan langsung dari pemerintah pusat di BPPK Ciloto yang dilakukan secara virtual Terdapat stakeholder yaitu kerjasama dengan berbagai lintas sektor seperti TNI-POLRI, pemerintah daerah dengan tujuan untuk mensukseskan pelaksanaan vaksinasi ini 	<ul style="list-style-type: none"> SDM untuk pelaksanaan vaksinasi sudah tercukupi. Dalam pelaksanaannya, SDM telah diberikantugas masing-masing Kegiatan vaksinasi ada 2: <ul style="list-style-type: none"> Kegiatan menarik massa, menggerakkan massa yang dilaksanakan oleh pemilik wilayah seperti Camat, Lurah, Kepala Dusun (Kadus) dan pembinaan wilayah yang dilakukan oleh TNI-POLRI melalui Babin Kamtibmas maupun Babinsanya. Pemberi layanan vaksinasi dilakukan oleh petugas kesehatan yang semuanya berasal dari Puskesmas Muara Bulian. Pada awal pelaksanaan vaksinasi, pembagian tugas juga telah dilakukan dengan membagi ke dalam 4 meja yaitu meja 1 registrasi, meja 2 Skrining (pemeriksaan fisik awal), meja 3 vaksinator dan meja 4 bagian entry (semua staf Puskesmas Muara Bulian sudah masuk ke dalam kategori minimal kompetensi) Dari tim vaksin yang berjumlah 20 orang, yang mengikuti pelatihan kegiatan vaksinasi hanya sekitar 6-8 orang atau 40% sudah terlatih dan bersertifikat, sedangkan 12 orang (60%) tidak mengikuti pelatihan karena kuota yang terbatas dan program percepatan vaksinasi sudah berjalan. 	<ul style="list-style-type: none"> Setiap SDM sudah mendapat pembagian tugas masing-masing seperti kebijakan utamawaktu awal kegiatan vaksinasi yang terdiri dari meja 1,2,3 dan 4. Kemudian, ada kebijakan terbarunya ada 2 meja sehingga tim vaksinasi mengikuti juknis yang ada. Perlu dilakukan Kerjasama lintas sector seperti camat yang memiliki wilayah, anggota desa (perangkat-perangkat desa dibawahnya seperti Rukun Tetangga (RT), Kepada Dusun (Kadus)). Hal ini juga dikarenakan salah satu wilayah di Puskesmas Maro Sebo Ilir, masyarakatnya sulit untuk diberikan sesuatu yang baru termasuk vaksinasi. Tim promosi kesehatan dengan tugasnya mempromosikan vaksinasi secara terus menerus agar dapat meningkatkan cakupan vaksinasi. SDM sudah tercukupi dengan 3 Desa dan 1 Kelurahan yang harus dijangkau. Peran serta lintas sector perlu ditingkatkan lagi karena banyak kendala dilapangan dimana masih banyak masyarakat yang tidak mau, merasa vaksin itu tidak penting sehingga membutuhkan peran serta lintas sektor. 	<ul style="list-style-type: none"> SDM dalam pelaksanaan vaksinasi melibatkan hampir seluruh tenaga kesehatan di Puskesmas Penerokan SDM telah memenuhi standar kualifikasi pendidikan SDM yang terlibat telah diberikan pelatihan dengan kuota sebanyak 5 orang yang kemudian meneruskan kepada tenaga kesehatan lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi Tim pelaksanaan vaksinasi terdiri dari 3 tim khusus dan 2 tim dari bidan desa Dalam pelaksanaan vaksinasi ini, Puskesmas bekerja sama dengan lintas sektor yang terdiri dari kecamatan TNI, POLRI, Kemenag dan bidan desa Kendala <ol style="list-style-type: none"> Tidak semua tim khusus vaksinasi mendapat pelatihan langsung dari pemerintah pusat Kurangnya tenaga kesehatan khususnya di Puskesmas Penerokan di wilayah-wilayah

terpencil
yang sulit
dijangkau

- Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan untuk meningkatkan capaian vaksinasi di atas 70%, Puskesmas menambahkan dan melatih bidan di wilayah desanya masing-masing untuk membantu dalam pemberian vaksinasi

Kendala:

1. Tidak semua tim vaksinasi mengikuti pelatihan karena kuota yang terbatas dan program percepatan vaksinasi yang sudah berjalan.
2. Masih banyak masyarakat yang tidak mau, merasa vaksin itu tidak penting sehingga membutuhkan peran lintas sektor
2. Kurangnya tenaga kesehatan khususnya di Puskesmas Penerokan dengan kondisi wilayah yang sulit dijangkau

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sumber daya manusia untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-10 sudah tercukupi dengan baik. SDM yang terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi sudah diberikan pelatihan dan memenuhi kualifikasi standar pendidikan. Namun, dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terdapat kendala diantaranya kurangnya penguatan yang diberikan dari pemerintah

daerah kepada Puskesmas di Wilayah Kerja Kabupaten Batanghari untuk memperkuat kebijakan pelaksanaan vaksinasi tersebut, pelatihan vaksinasi yang tidak diberikan pada seluruh tim vaksinasi karena adanya kuota yang terbatas dan kurangnya tenaga Kesehatan khususnya di wilayah kerja Puskesmas Penerokan yang disebabkan adanya wilayah yang sulit dijangkau.

Dana

Kasi Survelen dan Imunisasi	Kepala Puskesmas Muara Bulian	Kepala Puskesmas Maro Sebo Ilir	PJ MUTU Puskesmas Penerokan
<ul style="list-style-type: none"> • Dana pelaksanaan vaksinasi dibantu dari pemerintah daerah yaitu dana APBD. • Dalam pelaksanaannya, yang mengatur pendanaan adalah pemerintah daerah berdasarkan SK Bupati. • Adapun penggunaan dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan COVID-19, kegiatan vaksinasi seperti untuk uang transportasi tenaga vaksinator, uang makan dan minum, uang transportasi pengambilan vaksin dari Kabupaten, dana insentif dan dana untuk PE. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Untuk kegiatan vaksinasi berasal dari dana APBD Dinas Kesehatan • Dana digunakan untuk gerak tenaga Kesehatan seperti untuk insentif dan uang makan • Untuk fasilitas pendukung berasal dari luar APBD yaitu dana alternatif BOD Puskesmas seperti pembelian laptop, computer dan kertas. • Pendanaan kegiatan vaksinasi diatur oleh Komando di Sekretariat Dinas kesehatan dan juga bidang P2 • Dana yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan pemerintah daerah yang pertama menyangkut besaran insentif pemberian 1 dosis sebesar Rp. 7500, -. Sedangkan untuk uang makan dan minum, transportasi diatur oleh DPA dibidang P2. • Namun, di Muara Bulian telah ada peraturan bupati yaitu tidak ada SPPD, sehingga tidak ada uang transportasi, yang tercover hanya insentif dan uang makan minum 	<ul style="list-style-type: none"> • Dana kegiatan vaksinasi murni dari pemerintah daerah berupa insentif, makan minum, turun kedesa dan transportasi pengambilan vaksin di Kabupaten dan biaya pengelolaan limbah medisnya. • Untuk pendanaan, diatur oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan bupati tentang tarif insentif, besaran transport dan SPPD • Namun, dana yang diberikan pemerintah daerah itu kurang seperti insentif yang hanya diberikan Rp. 7500, - per dosis 	<ul style="list-style-type: none"> • Dana pelaksanaan vaksinasi berasal dari pemerintah daerah yaitu dana APBD dari Dinas kesehatan dan dana BLUD Puskesmas Penerokan • Dana dialokasikan untuk makan dan minum tenaga kesehatan, transport dan insentif dengan besaran Rp. 7500,- per dosis • Dana pelaksanaan vaksinasi diatur dalam peraturan pemerintah daerah dan seluruh kebijakan berasal dari Dinas Kesehatan

Kendala :

1. Dana insentif untuk tenaga kesehatan yang kurang yaitu hanya diberikan Rp. 7500, - per dosis.
2. Di wilayah kota Muara Bulian tidak ada uang transportasi, yang tercover hanya insentif dan uang makan minum karena telah ada peraturan bupati yaitu tidak ada SPPD.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dana untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-10 berasal dari dana APBD. Dana tersebut dialokasikan untuk transportasi, makan dan minum serta insentif tenaga kesehatan yang terlibat dalam vaksinasi. Dana pelaksanaan vaksinasi diatur oleh pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan. Akan tetapi, untuk mencukupi kebutuhan pelaksanaan vaksinasi seperti pembelian laptop, kertas, dan sebagainya

Puskesmas Muara Bulian dan Puskesmas Penerokan menggunakan dana BLUD Puskesmas sebagai dana tambahan. Dalam pendanaan pelaksanaan ini juga terdapat beberapa kendala yaitu tidak sesuai dana insentif Rp. 7.500, -/ dosis untuk tim vaksinasi dan tidak adanya dana untuk transportasi untuk Puskesmas Muara Bulian yang disebabkan adanya aturan bupati yaitu tidak ada SPPD.

Sarana dan Prasarana

Kasi Survelen dan Imunisasi	Kepala Puskesmas Muara Bulian	Kepala Puskesmas Maro Sebo Ilir	PJ MUTU Puskesmas Penerokan
<ul style="list-style-type: none"> Sarana dan prasarana untuk pelaksanaan vaksinasi sudah cukup. Untuk sarana dan prasarana seperti tempat penyimpanan vaksin langsung dari provinsi, disimpan dalam Gudang Farmasi kedalam 1 tempat atau 1 pintu. Untuk cold chain, termos, pendingin dan blue ice sudah cukup, serta jarum suntik, handscoon dan sebagainya sudah tercukupi. Dalam pemenuhan sarana dan prasarana ini sudah ada perencanaan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan vaksinasi tersebut. Tidak ada kendala dalam sarana prasarana, walaupun ada seperti Cold chain yang rusak tetapi masih bisa teratasi di Kabupaten dan kendala tersebut tidak begitu signifikan 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 telah dilaksanakan sesuai kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi pandemik COVID-19. Kebijakan pelaksanaan COVID-19 ini berasal dari pemerintah pusat sendiri melalui Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, SATGAS COVID-19 dan BNPB mulai dari pelaksanaan vaksinasi, penyimpanan, syarat perjalanan dan sebagainya Dalam pelaksanaan kebijakan, terdapat kendala yaitu tidak adanya turunan kebijakan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yang artinya tidak ada penguatan lagi dari pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan pelaksanaan vaksinasi tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan vaksinasi untuk Kabupaten Batanghari sudah mengikuti kebijakan pusat contohnya capaian vaksinasi harus 70%, waktunya pelaksanaan vaksinasi anak sekolah dan waktunya vaksinasi booster. Pelaksanaan sudah dilakukan dengan percepatan vaksinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan pelaksanaan COVID-19 telah dilaksanakan sesuai Permenkes No.10 tahun 2021 tentang vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Kebijakan diturunkan ke pemerintah daerah masing-masing, turunannya sudah sangat optimal untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Batang Hari. Ada beberapa wilayah dalam target vaksinasi Puskesmas penerokan yaitu 7 Desa yang terdiri dari Desa Penerokan, Mekar Jaya, Ladang Keris, Bajubang, Desa Sungkai, Pompa Air dan Desa Bungku. Dari ketujuh desa tersebut, Desa Bungku merupakan desa yang sangat luas.
<p>Kendala :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kebijakan hanya dari Pemerintah pusat, Pemerintah daerah tidak membuat turunan yang artinya tidak ada penguatan lagi dari pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan pelaksanaan vaksinasi tersebut. 			

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sarana dan prasarana sudah terpenuhi dengan baik. Akan tetapi, ada beberapa kendala dari Puskesmas yakni pemenuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan vaksinasi secara *door to door* sehingga mengharuskan tim tenaga Kesehatan membawa perlengkapan vaksinasi dan

bertanggung jawab membawa pulang dan tidak boleh tinggal di tempat pemberian vaksinasi. Sedangkan untuk Puskesmas Penerokan terdapat beberapa kendala yaitu sarana dan prasarana untuk tim tambahan diluar tim khusus vaksinasi, kendala transportasi dan listrik yang mengalami masalah/kerusakan

Metode

Kasi Survelen dan Imunisasi	Kepala Puskesmas Muara Bulian	Kepala Puskesmas Maro Sebo Ilir	PJ MUTU Puskesmas Penerokan
<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini diserahkan kepada tim tenaga kesehatan di masing-masing Puskesmas, karena tenagakesehatan di Puskesmas yang 	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa strategi yang dilakukan tim tenaga kesehatan, pertama melakukan vaksinasi setiap hari kerja, dimana tempat pelaksanaan vaksinasi tersebut mudah dijangkau seperti pernah dilakukan di kantor Bupati sehingga menjadi pusat pelayanan gerai imunisasi Kedua, dengan jumlah penduduk ± 36.000, pemerintah menggiatkan 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan capaian tertinggi di Kabupaten Batang Hari memilih metode atau cara pelaksanaan vaksinasi untuk saat ini secara <i>door to door</i>. Hal ini dilakukan karena ada karakter masyarakat yang tidak mau mandiri atau tidak memiliki kesadaran secara mandiri untuk melaksanakan vaksinasi kepuskesmas. 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan vaksinasi dimulai dengan metode gerai sebagai metode awal. Gerai tidak hanya di buka wilayah-wilayah tertentu, tetapi gerai dibuka dari Senin – Sabtu di Puskesmas Penerokan dari jam 08.00-12.00 WIB.

mengetahui wilayah dan daerah perjalanannya.	<p>kegiatan serbu vaksin dimana kegiatan ini bertujuan untuk percepatan vaksinasi seperti POLRES membuka gerai vaksinasi di Bulian Sport Center, yang akhir-akhir ini dibuka setiap hari.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketiga, strategi untuk peningkatan vaksinasi dengan membuka gerai di kampus, kebetulan ada kampus di Muara Bulian, • Keempat melibatkan organisasi pramuka, organisasi pemuda lain yang memiliki jumlah anggota banyak dan bersifat kemasyarakatan. • Di tambah lagi, bantuan POLRI dengan melakukan razia di tempat-tempat ramai • TNI melakukan pendekatan ke Kepala Desa, lurah-lurah untuk mengumpulkan masyarakat dan melaksanakan vaksinasi setelah sholat Jum'at 	<ul style="list-style-type: none"> • Puskesmas sudah pernah melaksanakan vaksinasi di 1 tempat tetapi antusias masyarakatnya hanya sedikit. Dengan perlengkapan yang cukup, akhirnya tim tenaga Kesehatan memutuskan untuk melakukan kegiatan vaksinasi secara <i>door to door</i> agar mampu meningkatkan capaian vaksinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudian Puskesmas menjalankan strategi kedua itu meminta bantuan dari bidan desa. • Ketiga, melakukan Kerjasama dari PT, kebetulan di Wilayah Puskesmas Penerokan terdapat PT.BSU yang memiliki karyawan dengan jumlah ribuan. • Keempat, Puskesmas melakukan Kerjasama lintas sector seperti Kemenag, camat dengan melakukan vaksinasi Ketika ada acara-acara di desa seperti di bulan puasa, vaksinasi dilakukan di masjid setelah shalat tarawih.
--	--	--	---

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa metode pelaksanaan yang dilakukan dalam vaksinasi COVID-19 sudah dilaksanakan sangat baik dengan adanya Kerjasama lintas sector seperti Pemerintah Daerah (Camat, Lurah), TNI-POLRI, Kemenag,

Bidandes, Perusahaan, kampus, organisasi pramuka dan organisasi pemuda. Tidak ada kendala yang ditemukan dalam metode pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Batang Hari.

Sasaran

Kasi Survelen dan Imunisasi	Kepala Puskesmas Muara Bulian	Kepala Puskesmas Maro Sebo Ilir	PJ MUTU Puskesmas Penerokan
<ul style="list-style-type: none"> • Sasaran vaksinasi adalah masyarakat rentan, petugas kesehatan, petugas public, remaja, lansia dan anak. • Namun dalam pelaksanaannya, terdapat kendala pada sasaran yaitu sulit untuk mengajak masyarakat untuk mengikuti kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sasaran yang diberikan vaksinasi sudah tepat sasaran dan sesuai dengan juknis yang ada. • Syarat-syarat khusus untuk sasaran vaksinasi yang pertama adalah umur, karena ada beberapa golongan yang boleh diberikan vaksin jenis A dan ada yang tidak. Sedangkan syarat kedua adalah lolos skrining. • Sasaran yang tidak dapat diberikan imunisasi COVID-19 adalah orang dalam pengobatan penyakit akut apapun jenisnya, orang yang punya alergi obat. Selain itu, boleh diberikan imunisasi kecuali memiliki usia di bawah 6 tahun. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sasaran vaksinasi mengikuti kebijakan yang ada. Seperti anak sekolah, tim nakes melakukan di sekolah yang dituju, pejabat/aparaturs desa yang dilaksanakan di kantor desa dan lansia yang dilakukan <i>door to door</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Sasaran vaksinasi di Wilayah Kecamatan Bajubang sebersar 34.000 yang terdiri dari usia 6-11 tahun, usia 12-17 tahun, 18 tahun keatas, lansia dan masyarakat rentan. • Terdapat syarat-syarat khusus untuk sasaran vaksinasi seperti anak usia 6-11 tahun yang dikhususkan menggunakan vaksinasi Sinovac, usia 12 tahun keatas yang bisa menggunakan vaksin Moderna, Pfizer dan Astrazeneca • Pelaksanaan vaksinasi sudah tepat sasaran dan sesuai dengan yang ditargetkan.
<p>Kendala :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sulit untuk mengajak masyarakat untuk mengikuti kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan. 			

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pelaksanaan vaksinasi sudah tetap sasaran dan sesuai dengan yang ditargetkan. Dalam pelaksanaannya, tim vaksinasi juga menerapkan syarat-syarat khusus bagi sasaran vaksinasi untuk mencegah terjadinya hal-hal

yang tidak diinginkan. Dalam sasaran vaksinasi, terdapat kendala yakni masyarakat yang sulit diajak untuk mengikuti kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan.

Proses

Kasi Survelen dan Imunisasi	Kepala Puskesmas Muara Bulian	Kepala Puskesmas Maro Sebo Ilir	PJ MUTU Puskesmas Penerokan
<ul style="list-style-type: none"> • Dalam mengejar target Pemerintah daerah memiliki rencana dan memfokuskan pada lansia dimana capaian vaksinasinya sebesar 69% dan menjadi salah satu kendala dalam kegiatan vaksinasi. • Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah daerah berencana untuk mengedukasi lansia tentang pentingnya pelaksanaan vaksinasi. Seperti yang kita ketahui, bahwa lansia yang tidak mengikuti kegiatan vaksinasi Sebagian besar memiliki komorbid sehingga tidak diberikan izin oleh anak atau keluarga untuk melakukan vaksinasi. • Dalam pengorganisasian kegiatan vaksinasi, Dinas Kesehatan memiliki tim fasilitator yang memiliki macam-macam tugas di bagian perencanaan, di bagian lapangan dan bagian pendanaan untuk masalah insentif yang pembagiannya tertuang dalam SK. Namun tidak ada pelatihan khusus yang diberikan kepada tim fasilitator. • Untuk pelaksanaan vaksinasi, memiliki sedikit kendala seperti input data yang dilakukan secara manual dan data KPC PEN. Terdapat sedikit perbedaan dikarenakan saat awal pelaksanaan vaksinasi, input data menggunakan <i>P-Care</i> TNI yang memasukkan data ke Provinsi Jambi. Sehingga ada data Sebagian masuk ke Provinsi Jambi sekitar 10% dan menyebabkan capaian yang tidak sama. • Sosialisasi kegiatan vaksinasi COVID-19 sudah cukup untuk pelaksanaannya. Dinas Kesehatan sudah melakukan sosialisasi dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan spanduk-spanduk, membagikan selebaran-selebaran (<i>leaflet</i>) dan melalui media radio serta sosialisasi lintas sektor melalui Kominfo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proses kegiatan vaksinasi COVID-19 dimulai dengan tahap perencanaan. Namun, menurut Kepala Puskesmas Muara Bulian perencanaan dalam alur kerja dari koordinasi dinas Kesehatan dengan puskesmas sendiri memiliki kesenjangan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. • Kepala Puskesmas menginginkan bahwa pelaksanaan vaksinasi dilakukan bertahap, misalnya vaksinasi dosis 1 setelah selesai, lanjut dosis ke 2 dan selesai dosis 2 lanjut dosis ke 3. Tidak seperti yang terjadi saat ini, belum selesai dosis 1, sudah ke dosis 2, belum selesai dosis ke 2 lanjut ke dosis ke 3. • Hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan vaksinasi pada saat itu. • Namun untuk pengaturan jadwal disusun oleh puskesmas. Untuk rencana target capaian vaksinasi, mengikuti strategi dari Dinas Kesehatan. jadi, disimpulkan bahwa perencanaan target kategori dan dosis vaksin berasal dari Dinas Kesehatan. • Dalam pelaksanaan vaksinasi, salah satu kendala lainnya adalah sosialisasi kemasyarakat. Hal ini dikarenakan sosialisasi belum selesai dilakukan, sudah masuk kategori baru sehingga menyebabkan <i>miss</i> komunikasi dengan masyarakat. Akhirnya, masyarakat lebih banyak menerima <i>HOAKS</i> dibandingkan semangat untuk mengikuti kegiatan vaksinasi. • Sosialisasi yang tidak selesai yang disebabkan adanya kebijakan lain dari pemerintah, menimbulkan kebingungan pada masyarakat, karena 	<ul style="list-style-type: none"> • Proses perencanaan kegiatan vaksinasi di Puskesmas Maro Sebo Ilir dimulai dari pembuatan jadwal vaksinasi yang disesuaikan dengan lokasi atau ketersediaan vaksinnnya. Contohnya, kalau ketersediaan vaksin banyak, maka jadwal vaksinasi lebih lengkap, tetapi kalau ketersediaan vaksin sedikit, maka tenaga Kesehatan akan mengurangi jadwal vaksinasi. • Dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19, tim nakes telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya vaksinasi melalui kegiatan UKBM seperti posyandu balita, posyandu lansia dan kelas ibu hamil. • Setia pada rapat-rapat lintas sector seperti musyawarah desa juga dilakukan sosialisasi vaksinasi. • Pihak puskesmas juga telah melakukan rapat-rapat dengan mengundang camat, kades terkait kondisi terakhir capaian vaksinasi di setiap wilayah termasuk Kerjasama dengan puskesmas lain. • Puskesmas Maro Sebo Ilir juga mengundang stake holder di 1 Kecamatan dan memaparkan capaian terakhir sehingga pihak tersebut mengetahui desa-desa yang capaiannya rendah dan harus melibatkan peran serta pemerintah di wilayah desa itu, karena kalau hanya tim tenaga kesehatan, capaian vaksinasi tidak mungkin tercapai. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan vaksinasi dimulai dari perencanaan jadwal kegiatan yang sesuai instruksi dari Dinas Kesehatan seperti periode ini untuk usia 6-11 tahun, atau periode ini dilakukan vaksinasi untuk usia 12-17 tahun. • Pelaksanaan vaksinasi disesuaikan dengan ketersediaan vaksin dari Dinas Kesehatan seperti APD, Bahan Sekali Pakai, dan vaksin COVID-19 itu sendiri. • Sosialisasi pelaksanaan vaksinasi sudah dilakukan sejak awal sebelum perencanaan vaksinasi dilakukan. • Sosialisasi dilakukan dengan turun kedesa-desa (dusun, RW, pasar-pasar tradisional) untuk memberikan informasi mulai dari bahaya COVID-19, vaksin COVID-19 dan sebagainya. • Sosialisasi juga dilakukan dengan memanfaatkan media social seperti pemberitahuan jadwal vaksinasi yang lebih efektif untuk menyebarkan informasi vaksinasi COVID-19. • Adapun kendala yang ditemui adalah transportasi untuk sosialisasi, stok vaksinasi yaitu dimana minat masyarakat tinggi tetapi vaksin tidak ada ataupun sebaliknya. • Selain itu, masalah jenis vaksin seperti vaksin multidose dimana 1 vial untuk 12 dosis atau 6 dosis yang harus digunakan tetapi masyarakat yang datang hanya 2 atau 3 orang. • Adanya bantuan lintas sektor seperti melakukan vaksinasi di malam hari setelah terawih yang dihimbau oleh pak camat dengan memberikan doorprize sehingga masyarakat tertarik dan diharapkan dapat meningkatkan capaian vaksinasi

pada awalnya masyarakat hanya mengetahui setelah dosis 1 ada dosis 2.

- Namun karena adanya perubahan kebijakan, menyebabkan masyarakat menjadi enggan untuk divaksin karena petugas Kesehatan dianggap mengakal-akali dan sudah tertipu daya oleh isu-isu yang beredar di masyarakat.
- Selain itu, kendala lain dalam kegiatan sosialisasi adalah baik dari pemerintah daerah lebih khususnya kelintas sector seperti SATGAS COVID-19 sebagai pusat pemandu pelaksana tugas hariannya kurang memanfaatkan media baik berupa spanduk dan radio. Namun, sosialisasi kepada kepemimpinan baik camat atau kepala desa sudah dilakukan. Dan salah satu yang menghambat kegiatan sosialisasi adalah adanya PPKM sehingga tenaga Kesehatan tidak bisa mengumpulkan massa, sehingga pada akhirnya masyarakat mencari informasi sendiri melalui media televisi atau media internet, dan tenaga Kesehatan tidak mengetahui apakah informasi yang diterima berupa *HOAKS* atau memang murni dari kementerian kesehatan

Kendala :

1. Input data yang dilakukan secara manual dan data KPC PEN serta mengalami selisih pada awal pelaksanaan vaksinasi
2. Kebingungan masyarakat akan pelaksanaan vaksinasi yang disebabkan belum selesainya vaksinasi dosis 1, hadir vaksinasi dosis 2 dan kemudian hadir vaksinasi dosis 3 yang menyebabkan masyarakat menjadi enggan untuk divaksin karena petugas kesehatan dianggap menipu dan mengakal-akali masyarakat
3. Kurang memanfaatkan media baik berupa spanduk dan radio
4. Transportasi untuk sosialisasi, stok vaksinasi dan minat masyarakat
5. Masalah jenis vaksinasi multidose

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa proses pelaksanaan vaksinasi COVID-19 telah berjalan dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan sosialisasi vaksinasi tersebut. Akan tetapi, terdapat beberapa kendala seperti pelaksanaan kegiatan vaksinasi yang tidak konsisten sejak awal seperti vaksinasi dosis 1 ke vaksinasi dosis 2, kemudian dilanjutkan ke vaksinasi dosis ke-3

sehingga menyebabkan menurunnya minat masyarakat. Selain itu, kurang memanfaatkan media baik spanduk dan radio untuk sosialisasi, keterbatasan transportasi, stok vaksinasi dan jenis vaksinasi multidose menjadi kendala dalam proses pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

Hasil Cakupan Vaksinasi Covid-19

Kasi Survelen dan Imunisasi	Kepala Puskesmas Muara Bulian	Kepala Puskesmas Maro Sebo Ilir	PJ MUTU Puskesmas Penerokan
<ul style="list-style-type: none"> • Capaian vaksinasi sudah memenuhi target sebesar 82% untuk dosis 1. Untuk dosis 2 masih belum tercapai sebesar 68% dan untuk dosis 3 atau booster masih rendah karena masih dalam tahap pelaksanaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Capaian vaksinasi dosis 1 sudah memenuhi target yaitu sebesar 80%, sedangkan untuk dosis 2 sebesar 60% dan dosis 3 sebesar 10% belum mencapai target vaksinasi COVID-19 sesuai dengan kebijakan pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Capaian vaksinasi dosis 1 sebesar 80% yang memenuhi target. Sedangkan dosis 2 dan dosis 3 masih dibawah target Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Capaian vaksinasi dosis 1 memenuhi target vaksinasi. Sedangkan dosis 2 dan dosis 3 belum mencapai target vaksinasi

Focus Group Discussion (FGD)**Kecamatan Maro Sebo Ilir**

Hasil FGD yang telah dilakukan di Kecamatan Maro Sebo Ilir dengan informan yang terdiri dari masyarakat tidak vaksin dan masyarakat vaksin, remaja usia 12-18 tahun, masyarakat usia > 18 tahun dan lansia diketahui bahwa seluruh informan mengetahui apa itu vaksinasi COVID-19 yaitu dengan jawaban vaksin yang tidak sakit, enak dan memiliki manfaat, untuk mencegah COVID-19, untuk kekebalan mencegah COVID-19, agar sehat dan untuk kekebalan, untuk meningkatkan daya tahan tubuh mencegah COVID-19. 2 dari 6 informan tersebut pernah mendapatkan sosialisasi pelaksanaan COVID-19 di kantor desa dan di sekolah. Hasil penelitian di Kecamatan Maro Sebo Ilir juga menunjukkan bahwa 8 informan melaksanakan vaksinasi dosis 1, pada dosis 2 hanya 4 orang dan dosis 3 hanya 3 orang. Sedangkan informan anak yang berusia 6-11 tahun, keduanya mengetahui apa itu vaksinasi dan sama-sama pernah mendapatkan sosialisasi di sekolah. Akan tetapi, hanya 1 dari 2 anak itu yang mengikuti vaksinasi karena mengikuti arahan dari sekolah dan adanya kemauan dari diri sendiri.

Diketahui bahwa 2 informan yang tidak melaksanakan vaksinasi dosis 2 dan 3 memiliki alasan tidak mau vaksin karena takut dan tidak mau vaksin karena mendengar informasi dari teman kalau vaksin bisa buat sakit sehingga takut tidak bisa beraktivitas lagi. Sedangkan 2 informan yang mengikuti vaksin dosis 1,2 dan 3 merasakan hal yang berbeda setelah divaksin, informan A menyatakan tidak ada efek samping sedangkan informan B mengatakan daya tahan tubuh menurun dan demam setelah di vaksin. Menurut pandangan informan, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sudah cukup baik dan maksimal, karena vaksinasi dilaksanakan sampai kerumah-rumah, bulan puasa ini sampai ke surau-surau. Adapun kendala dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Maro Sebo Ilir adalah masyarakat yang percaya kepada berita-berita HOAKS sehingga takut untuk divaksin.

Kecamatan Bajubang

Hasil FGD yang telah dilakukan di Kecamatan Bajubang dengan informan yang terdiri dari masyarakat tidak vaksin dan masyarakat vaksin, remaja usia 12-18 tahun, masyarakat usia > 18 tahun dan lansia diketahui bahwa seluruh informan mengetahui tentang vaksinasi COVID-19 dan mendapatkan sosialisasi tentang vaksinasi baik dari pihak puskesmas maupun RT setempat. Diketahui bahwa 3 orang yang belum pernah vaksin dikarenakan tidak lolos screening, keadaan kesehatan yang tidak memungkinkan seperti hipertensi, sesak napas dan batuk sebagai tindak lanjut yaitu pengobatan rutin kepada komorbid agar bisa divaksin.

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di kecamatan Bajubang menurut pandangan informan sudah sangat baik tetapi masih perlu ditingkatkan lagi sosialisasinya agar masyarakat lebih teratur dan mau divaksin. Masih kurangnya dukungan lintas sektor dan masih ada pelayanan publik yang tidak mau di vaksin menjadi kendala pelaksanaan vaksinasi di Bajubang.

Kecamatan Muara Bulian

Hasil FGD yang telah dilakukan di Kecamatan Muara Bulian dengan informan yang terdiri dari masyarakat tidak vaksin dan masyarakat vaksin, remaja usia 12-18 tahun, masyarakat usia > 18 tahun dan lansia diketahui bahwa seluruh informan mengetahui tentang vaksinasi COVID-19 yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah penyakit COVID-19. Para informan juga mengatakan bahwa mendapat sosialisasi tentang pelaksanaan vaksinasi seperti lansia mendapat sosialisasi di Puskesmas dari petugas Kesehatan sebanyak 1 kali di Puskesmas dan seorang remaja sudah mendapatkan sosialisasi vaksin 1 kali disekolah dari guru. 6 dari 8 informan telah mendapatkan dosis 1 dan 2 vaksin COVID-19. Sedangkan untuk vaksin dosis 3, hanya 4 dari 8 informan yang melaksanakan. Adapun alasan beberapa informan tidak melaksanakan vaksinasi adalah tidak lolos skrining karena tidak memenuhi syarat vaksinasi yaitu memiliki riwayat hipertensi, naik

tangga sesak dan memiliki Riwayat operasi. Alasan kedua adalah tidak mau vaksin ketiga karena saat vaksin 1 dan 2 demam. Sehingga menimbulkan rasa takut.

Alasan ketiga adalah tidak mau vaksin ketiga karena takut sakit seperti saat vaksin 1 (pegal dilengan bekas suntik) dan pusing setelah vaksin ke-2. Berdasarkan hasil diskusi dengan masyarakat diketahui pula bahwa beberapa informan mengatakan terdapat efek samping setelah vaksin yaitu badan pegal, sakit-sakit, meriang, mual dan pusing. Informan juga mengatakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sudah sangat baik karena dapat memutus rantai penularan COVID-19.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa pelaksanaan vaksinasi di 3 Kecamatan Kabupaten Batang Hari telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sumber Daya Manusia (SDM) tercukupi, dana yang digunakan dalam pelaksanaan vaksinasi berasal dari APBD dan diatur langsung oleh pemerintah daerah. Ada tambahan dana yang berasal dari dana BLUD Puskesmas untuk pemenuhan kebutuhan makan minum dan pembelian laptop, kertas dan sebagainya. Sarana dan prasarana dalam pelaksana vaksinasi juga tercukupi, bila ada kendala tidak begitu signifikan. Dalam penjadwalan kegiatan vaksinasi ditentukan langsung dari masing-masing Puskesmas dan hasil capaian vaksinasi dari 3 Kecamatan yang diteliti masing-masing telah mencapai target 70% untuk vaksin dosis 1, sedangkan dosis 2 dan dosis 3 belum mencapai target provinsi. Namun dalam pelaksanaannya juga terdapat beberapa kendala seperti dana yang kurang khususnya insentif tenaga kesehatan, tidak semua SDM yang terlibat pelaksanaan COVID-19 diberikan pelatihan, perlunya tambahan SDM untuk pelaksanaan vaksinasi di wilayah-wilayah terpencil, sosialisasi vaksinasi kepada masyarakat yang kurang karena serempak dengan dilaksanakan PPKM, kurangnya pemanfaatan untuk media sosialisasi seperti spanduk dan radio, adanya sarana dan prasarana yang rusak seperti kendaraan operasional puskesmas, stokvaksinasi, genset serta perencanaan pelaksanaan yang kurang komunikasi. Untuk itu, masing-masing dari Puskesmas mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk memenuhi sarana prasarana dalam pelaksanaan vaksinasi dan memberikan bantuan untuk memperbaiki kendaraan operasional puskesmas dan genset sebagai antisipasi listrik padam yang mengalami masalah/kerusakan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E. J., Chen, L. K., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksun, M., Annisa, F., Jasirwan, C. O. M., & Yuniastuti, E. (2020). Coronavirus Disease 2019: TinjauanLiteraturTerkini. *JurnalPenyakitDalam Indonesia*, 7(1), 45. <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>
- [2] P2P Kemenkes RI. (2020). *PasienSembuh Covid 19 Bertambah 1.414 Per Tanggal 05 Juli , Total Menjadi 39.050*. <http://p2p.kemkes.go.id/pasien-semuh-covid-19-bertambah-1-414-per-tanggal-15-juli-total-menjadi-39-050/>.
- [3] WHO Indonesia. (2020). Coronavirus Disease IkhtisarKegiatan - 8. *World Health Organization*, 19(May), 2. <https://covid19.who.int/>
- [4] KemenKes, & KPC PEN. (2021). PaketAdvokasi. *Kementerian Kesehatan RI*, 9, 22–50.
- [5] Covid19. (2022). *Peta Sebaran Covid 19 pada bulanFebruari 2022*. <http://covid19.go.id>
- [6] PemerintahProvinsi Jambi. (2022). *Data Statistik Covid 19 Provinsi Jambi*. <https://corona.jambiprov.go.id/v2/>
- [7] Jenderal, D., & Masyarakat, K. (2020). *KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19*.
- [8] Kesehatan, K. (2021). Question (Faq) PelaksanaanVaksinasi Covid-. *Kesmas*, 2(1), 1–16. kesmas.kemkes.go.id
- [9] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4638/2021 TentangPetunjuk Teknis PelaksanaanVaksinasiDalamRangkaPenanggulanganPandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). *Jurnalrespirologi.Org*, 2019(2), 1–4. <http://www.jurnalrespirologi.org/index.php/jri/article/view/101>
- [10] RI, K. (2021). PMK No 10 Tahun 2021 TentangPelaksanaanVaksinasiDalamRangkaPenanggulang anPandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). *Permenkes RI*, 2019, 33. <https://persi.or.id/wp-content/uploads/2021/02/pmk10-2021.pdf>.